

LAMPIRAN

Tatkala/jadwal dalam penelitian ini ditentukan jadwal penelitian sebagai berikut:

NO	Kegiatan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6
1	Tahap Persiapan						
	Menyusun usulan penelitian						
	Menyusun kuesioner						
	Mengurus izin penelitian						
	Review usulan penelitian						
	Perbaikan usulan penelitian dan kuesioner						
2	Tahap Pengumpulan Data						
3	Tahap Penyelesaian Penelitian						
	Pengolahan data yang tersedia						
	Analisa data						
	Membuat konsep laporan						
	Mendiskusikan konsep laporan						
	Menyusun dan mengetik laporan						



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN KEMIJEN

Alamat : Jl. Penjaringan No.1 Telp. (024) 86042448 Semarang

No : 145/18/III/2021
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Wiyana, S.Sos
NIP : 19640514 198503 1 013
Jabatan : Lurah Kelurahan Kemijen

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yemima Octavia
NIM : 17.C1.0033
Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Soegijapranata

Telah selesai mengadakan penelitian di Kantor Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang pada tanggal 3 Maret s.d. 9 Maret 2021 guna menyusun Skripsi (S1) Fakultas Hukum dan Komunikasi, Program Studi Ilmu Hukum, Unika Soegijapranata Semarang yang berjudul **“Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Kemijen, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang”**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Semarang, 16 Maret 2021
Lurah Kelurahan Kemijen



Dwi Wiyana, S.Sos
NIP. 19640514 198503 1 013

Andre Kurniawan
Teacher at Soegijapra...
Log out

9.76%
Plagiarism approximately

Comments Print Share Download Close

Report #13398155

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk mengeluarkan aspirasinya. Pelayanan pemerintahan menjadi sorotan bagi masyarakat, jika pemerintah tidak melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Instansi Pemerintah yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakat adalah Kelurahan. Berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Pembentukan kelurahan dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna dalam melakukan pelayanan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menjadi pedoman dalam menjalankan Pemerintahan pada tingkat Kelurahan. Menurut Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya.

Plagiarism 9.76%
All
www.leip.or.id 9.72%
www.cilc.nl 9.66%
kecsmgutara.sema... 7.62%
#9665402 - Dellani... 6.72%
satudata.semaran... 6%
satudata.semaran... 5.68%
organisasi.semara... 5.2%
123dok.com 5.16%
dispora.semarangk... 5.11%
bpsdmd.jatengprov... 4.96%
brianddevido.blogs... 4.95%
In Quotes 0.93%

